



LAMPIRAN

Wawancara pada tanggal 2 November 2020, dengan Bapak Paskalis Juma S.KM selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi.

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo yang berkaitan dengan pengakuan?

Jawab: Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 November 2020 Menurut bapak Paskalis Juma, S.Km selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi untuk dikatakan sebagai aset tetap harus memenuhi semua kriteria. Contohnya suatu aset tetap yang lebih dari 1 tahun tetapi secara nilai aset tetap tersebut tidak memenuhi nilai kapitalisasi maka tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap. Dan juga kantor DPR tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap karena tidak digunakan dan masih sengketa, sehingga aset tersebut dipindahkan ke aset lain-lain. Yang menjadi temuan BPK bukan temuan uang tetapi temuan dalam pencatatannya terhadap laporan keuangan, bagaimana pencatatannya benar atau tidak sesuai dengan kondisi realnya. Contohnya seperti aset tetap yang belum jelas penguasaannya jangan dicatat di aset tetap, aset tetap itu menampung barang yang akan digunakan untuk operasional pemerintah. Dikebijakan akuntansi penjelasannya lebih rinci lagi, seperti dari masa manfaat itu dikelompokkan lagi, untuk aset tetap tanah tidak ada batas masa manfaatnya, karena tanah tidak ada penyusutan. Tanah dan aset tetap lainnya tidak dimasukkan dalam penyusutan. Kalau ada barang

atau tanah yang akan dihibahkan, jangan dicatat sebagai aset tetap tetapi dimasukkan di akun persediaan atau persediaan hibah.

Contoh kasus tanah yang bernilai nol, berarti perolehan aset tidak diukur secara andal. Untuk memperoleh nilai wajar maka harus hitung NJOPnya.

Untuk memperoleh nilai tanah bawah jalan = $P \times L \times \text{NJOP}/m^2$

Untuk kondisi terakhir di tahun 2019 untuk aset tetap tanah bawah jalan sudah ada nilai, pihak BKD sudah menetapkan nilai berdasarkan luasnya.

Contoh temuan tanah yang tidak diketahui keberadaannya, jangan dulu dimasukkan ke aset tetap, tanah tersebut tidak termasuk dalam kriteria berwujud dalam PSAP, sampai dikatakan temuan karena kesalahan pencatatan. Seharusnya pencatatannya dipindahkan ke aset lain-lain, karena aset tersebut masih dalam proses penelusuran, setelah ditemukan baru dimasukkan ke aset tetap. Tanah yang mau dihibahkan atau dijual harus dipindahkan ke persediaan.

2. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 terkait dengan pengukuran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tanah hibah yang bernilai nol maka harus dilakukan survey untuk nilai tanah pada saat tahun perolehannya untuk mendapatkan nilai wajar. Untuk memperoleh nilai wajar kira-kira teknik penilaiannya

seperti apa, apabila ada kuitansi maka pengukurannya berdasarkan biaya perolehan. Kalau untuk tanah berdasarkan NJOP/M2 .

Nilai kapitalisasinya seperti pembebasan tanah seperti uang makan, biaya pengurusan sertifikat, balik nama, biaya pematangan, biaya pengurusan, biaya penimbunan, biaya pengukuran, semua biaya tersebut ditotalkan semua untuk memperoleh nilai wajar.

Semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah ditotalkan semua untuk memperoleh nilai wajar. Dasar penilaian yang digunakan adalah NJOP.

3. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 terkait penerapan Penilaian Awal Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai maka biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang berada di kabupaten Nagekeo sebagian besar adalah hibah dari kabupaten induk (Kabupaten Ngada) pada tahun 2007, sehingga dalam proses penilaian awal aset tanah untuk kabupaten Nagekeo baru dilakukan pada tahun 2019. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) untuk memperoleh nilai wajar dari tanah tersebut. Untuk temuan tanah bawah jalan yang belum

dilakukan penilaian sudah ada tindak lanjut dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) yaitu menetapkan nilai berdasarkan luasnya.

4. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 terkait Pengeluaran Setelah Perolehan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pada Badan Keuangan Daerah kabupaten Nagekeo untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap tanah misalnya biaya pengurusan, yang sifatnya perataan, penimbunan, biaya balik nama, biaya sertifikat, dan semua biaya-biaya yang berkaitan dengan kepengurusan tanah tersebut ditotalkan sebagai nilai kapitalisasi perolehan tanah.

5. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 terkait Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pada Badan Keuangan Daerah untuk aset tetap tanah hanya dilakukan penilaian kembali (revaluasi) oleh pihak appraisal. Karena tiap tahunnya nilai tanah semakin meningkat maka dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar pada saat sekarang dengan NJOP terbaru.

6. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 terkait Penghentian dan Pelepasan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: untuk penghentian dan pelepasan aset tetap tanah biasanya dilakukan dengan penjualan, hibah, pemindahtanganan, dan penyertaan modal. Apabila suatu aset tetap tanah mau dijual dan sudah ada kesepakatan untuk dijual maka tanah tersebut tidak boleh dicatat di aset tetap tetapi dipindahkan ke persediaan. Untuk aset tanah yang mau dijual maka harus dilakukan penilaian oleh pihak appraisal untuk memperoleh harga jual yang wajar. Kalau untuk pihak Badan Keuangan Daerah hanya untuk menetapkan nilai untuk dimasukkan dalam neraca saja karena nilai tanahnya tidak boleh nol

7. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 terkait Pengungkapan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: rekonsiliasi aset tetap mencakup laporan akhir periode laporan dan penambahan pada periode tahun berjalan dimana berkaitan dengan kebijakan penambahan atau pengurangan nilai aset untuk dilaporkan ke BPK di dalam laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah dan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sudah dilakukan rekonsiliasi berkaitan dengan penambahan atau pengurangan aset pada tahun yang akan dilaporkan. Pada tahun anggaran 2019, diketahui bahwa terdapat beberapa aset tetap tanah yang berasal dari hibah termasuk tanah di dalamnya yang belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD yaitu 30 bidang tanah tidak mencantumkan

luas, 3 (tiga) bidang tanah tidak mencantumkan tahun perolehan, 1 (satu) bidang tanah tanpa lokasi, 2 (dua) bidang tanah tidak mencantumkan status penggunaan, serta 5 (lima) bidang tanah tidak mencantumkan status hak tanah, sehingga penambahan aset tetap tersebut belum diungkapkan juga dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Hal ini dikarenakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo selaku pengelola aset daerah tidak mengetahui adanya penyerahan aset tetap tersebut. Terdapat 5 (lima) bidang tanah yang dimanfaatkan masyarakat tanpa didasari perjanjian pemanfaatan, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Wawancara pada tanggal 10 November 2020, bersama Bapak Abdullah Latif S.E selaku Kepala Bidang Aset

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah terkait dengan temuan 6 bidang tanah yang belum diketahui keberadaannya?

Jawab : terkait dengan 6 bidang tanah Badan Keuangan Daerah tetap mengakui sebagai aset tetap BKD, walaupun sampai saat ini keberadaannya baik fisik maupun dokumennya itu masih ditelusuri. Dari 6 bidang tanah tersebut ada beberapa bidang tanah yang sudah diketahui keberadaannya misalnya tanah Maroladho saat ini adalah Rumah Sakit Aeramo, tanah POLRES, dan tanah SMP serta tanah Weweloe yaitu tanah terminal barat. Sedangkan yang belum ditemukan adalah tanah Perengating. Terkait pencatatan aset kedalam pengakuannya masih dicatat sebagai aset dan dalam perjalanan apabila dokumen-dokuman penyerahannya maupun fisiknya tersebut tidak ditemukan maka dalam laporan keuangan akan dicatat sebagai aset lain-lain. Dicatat ke aset lain-lain karena aset tersebut akan terus BKD tindaklanjuti dan kalau memang benar-benar tidak dapat ditemukan maka akan dikeluarkan dan dihapus dari aset Pemerintah Daerah dan dari catatan laporan keuangan milik Pemerintah Daerah.

2. Bagaimana kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yang digunakan BKD terkait temuan 6 bidang tanah yang belum

diketahui keberadaannya yang tetap dimasukkan kedalam laporan keuangan sebagai aset tetap?

Jawab : karena aset tersebut dasarnya adalah perolehan datanya sudah dicatat di kabupaten Ngada, terkait penyerahan-penyerahan tanah tersebut dilakukan pada saat masih bergabung dengan kabupaten Ngada dan terkait dengan kebijakan akuntansi itu masih terbawa dan tercatat sebagai aset tetap didalam kartu inventaris barang, walaupun secara fisik BPK menemukan tidak ada. Dan untuk tindaklanjut terhadap itu tugas Pemerintah Daerah menelusuri keberadaan aset. Tanah tersebut merupakan hibah dari masyarakat ulayat ke Pemerintah Kabupaten Ngada dan pada saat pemekaran pemerintah kabupaten ngada menyerahkan ke kabupaten nagekeo. Penyerahan itu secara dokumen administrasi saja dan pemerintah kabupaten nagekeo mengakui sebagai aset tetap dan mencatat walaupun keberadaannya belum diketahui.

3. Bagaimana dengan pengukuran yang dilakukan oleh pihak BKD terkait dengan tanah hibah?

Jawab : memang pengukuran itu ada tanah yang ada nilainya sudah ada dan juga yang tidak ada, pengukuran dilakukan bersama tim untuk mengetahui luasnya yang dilakukan bersama dinas PU dan terkait penerbitan sertifikat juga melibatkan orang pertanahan. Kalau untuk penilaian secara manual biasanya dilakukan sendiri oleh pihak

BKD. Setelah mengetahui luasnya maka untuk mencari nilai perolehannya dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

4. Bagaimana dengan penilaian awal aset tetap terkait dengan temuan 6 bidang tanah yang belum diketahui keberadaannya?

Jawab: penilaian berdasarkan NJOP terhadap nilai tanah wilayah setempat.

5. Bagaimana dengan pengeluaran setelah perolehan terkait 6 bidang tanah yang belum diketahui keberadaannya?

Jawab: biaya yang biasa dikeluarkan biasanya biaya honor tim, biaya inventarisasi terkait penelusuran, biaya perjalanan dinas.

6. Bagaimana dengan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal terhadap aset tanah?

Jawab: pengukuran berdasarkan NJOP setempat x luas wilayah.

7. Bagaimana dengan penghentian dan pelepasan terkait dengan temuan 6 bidang tanah yang belum diketahui keberadaannya?

Jawab: apabila dalam proses penelusuran tidak ditemukan maka akan dipindahkan ke aset lain-lain untuk nanti pemerintah daerah lakukan penghapusan dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

8. Bagaimana dengan pengungkapan di laporan keuangan terkait temuan 6 bidang tanah yang belum diketahui keberadaannya?

Jawab: untuk tahun 2019 pihak BKD tetap mencatat sebagai aset tetap di laporan keuangan nanti ditahun 2020 baru dipisahkan dan diungkapkan bahwa tanah tersebut telah ditemukan.

9. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap tanah terkait temuan tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga tanpa ada perjanjian tertulis?

Jawab: sebenarnya secara aturan ada perjanjian pinjam pakai apabila tanah pemerintah daerah yang digunakan pihak lain. Untuk terkait temuan tersebut tanah itu digunakan oleh Dinas Pertanahan, kantor SAMSAT, Dinas Pendapatan Provinsi, dan Dinas Pertanian. Tanah tersebut digunakan tanpa ada perjanjian tertulis sedangkan dari pihak Pemerintah Daerah rencananya tanah yang di gunakan tersebut akan dihibahkan ke dinas yang bersangkutan tetapi belum dilakukan.

10. Bagaimana kebijakan akuntansi aset tetap tanah terkait temuan 68 bidang tanah yang belum bersertifikat ,sedangkan di dalam PSAP 07 menjelaskan bahwa pengakuan aset tetap tanah akan andal apabila telah terjadi pemindahtanganan secara hukum seperti sudah bersertifikat?

Jawab: kebijakan di pemerintah daerah kabupaten nagekeo berkaitan dengan pengakuan yang namanya diakui sebagai aset tetap tidak semestinya bersertifikat, kami mengakui apabila sudah ada berita acara serah terima atas tanah dari ulayat ke pemerintah daerah. Nanti selanjutnya dasar dokumen itu untuk menerbitkan sertifikat.

11. Bagaimana dengan pengukuran aset tetap tanah yang terkait dengan temuan 68 bidang tanah yang belum bersertifikat?

Jawab: nanti pihak pemerintah daerah bersama dinas pertanahan melakukan pengukuran setelah itu akan dialokasikan anggaran untuk biaya penerbitan sertifikat.

12. Bagaimana penilaian awal aset tetap tanah terkait temuan 68 bidang tanah yang belum bersertifikat?

Jawab: penilaiannya dibuat berdasarkan NJOP tahun perolehan dikalikan dengan luasnya. Untuk 68 bidang tanah tersebut ada yang sudah memiliki nilai dan ada juga yang belum. sehingga pihak pemerintah daerah masih melakukan penilain untuk tanah yang belum memiliki nilai.

13. Bagaimana kebijakan akuntansi aset tetap tanah terkait temuan tanah bawah jalan dan tanah bawaah irigasi yang belum ada nilainya?

Jawab: jadi seperti yang di PSAP sebenarnya harus ada nilai tetapi karena pihak BKD sudah mencatatnya sebagai aset tetap maka BKD tinggal menindaklanjuti dengan melakukan penilaian.

14. Bagaimana pengakuan aset tetap tanah terkait temuan tanah bawah jalan dan tanah bawah irigasi yang belum ada nilainya?

Jawab: pihak BKD mengakui bahwa tanahnya memang ada tetapi nilainya yang tidak ada. Secara akuntansi pihak BKD hanya mengakui asetnya saja tetapi nilai dari aset itu belum ada. Sehingga BPK mengangkatnya sebagai temuan karena nilainya belum ada.

15. Bagaimana dengan pengukuran terkait temuan tanah bawah jalan dan tanah bawah irigasi yang belum ada penilaiannya?

Jawab: pengukurannya sesuai dengan mekanisme pengukuran yaitu berdasarkan NJOP.

16. Berdasarkan temuan yang sudah dijelaskan tadi, secara umum pengakuannya itu seperti apa sampai dinyatakan sebagai aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo?

Jawab: untuk semua temuan yang sudah dijelaskan tadi pengakuannya itu berdasarkan Berita Acara Hibah. Dan tugas BKD tinggal menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran terkait temuan tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

Lampiran 3

TEMUAN BPK RI 2018

TANAH YANG BELUM DIKETAHUI KEBERADAANNYA

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	Ket
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor					
1	Tanah Kering / Maroladho	01.01.11.05.05	0062	200.000	1994	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah Kosong	Hibah	1	10.980.000.000,00	BERSERTIFIKAT
2	Tanah Wewoloe (Rencana Terminal Barat)	01.01.11.05.05	0064		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah Kosong	Hibah	1	1.437.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT
3	Tanah Wewoloe (Rencana Gedung Telkom)	01.01.11.05.05	0065		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah Kosong	Hibah	1	1.437.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT
4	Tanah Wewoloe (Rencana Gedung PLN)	01.01.11.05.05	0066		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah Kosong	Hibah	1	1.437.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT
5	Tanah Perengating	01.01.11.05.05	0069		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah Kosong	Hibah	1	9.113.625.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT
6	TPI Nangadhero	01.01.11.04.23	0002	8845	2007	Ds. Nangadhero	Hak Pakai	01/02/1996	24090601200002	Bangunan TPI	Hibah	1	30.957.500,00	BERSERTIFIKAT
												6	24.437.082.500,00	
	Tanah Belum Tercatat													
	Tanah TPI Nggolonio	01.01.11.04.23		11210	2019	Desa Nggoloni	Hak Paka	15/03/2019	24.17.01.07.4.000	Bangunan TPI	Hibah	1	39.235.000,00	BERSERTIFIKAT

**TANAH PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO YANG BELUM BERSERTIFIKAT
PER 31 DESEMBER 2018**

lampiran 4

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	NAMA OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	
TANAH JALAN													
1	AEMALI - DANGA	01.01.11.08.01	0001	29,89	2007	Kec. Aesesa dan Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	AEWOE - WAYOPEA	01.01.11.08.01	0002	14,42	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	ALORAWA - TEDAKISA	01.01.11.08.01	0003	11,95	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	BATAWA - WOLOYADAWEA	01.01.11.08.01	0004	10,42	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	BOASABI - ALORAWA	01.01.11.08.01	0005	26,86	2007	Kec. Aesesa dan Aesesa Selatan	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	BOAWAE - LOWOBIA (BATAS NGADA)	01.01.11.08.01	0006	10,78	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	BOAWAE - MALAWITU - LEGUDERU	01.01.11.08.01	0007	7,97	2007	Kec. Boawae dan Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	BOLOROGA - YOBGEMO	01.01.11.08.01	0008	4,41	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	DADIWUWU - AEMAU	01.01.11.08.01	0009	9,00	2007	Kec. Aesesa	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	DEGHOWOLOWEA - DEGALEA - LOWOTUU	01.01.11.08.01	0010	12,36	2007	Kec. Nangaroro	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	DHEREISA - ALORAWA	01.01.11.08.01	0011	6,16	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	DORAMELI - LIAPO	01.01.11.08.01	0012	4,80	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	FATALEKE - KOEKOBHO	01.01.11.08.01	0013	10,81	2007	Kec. Nangaroro	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	GERO - RAJA	01.01.11.08.01	0014	11,89	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	HOBOPADU - DHEREISA	01.01.11.08.01	0015	11,32	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	KAJULAKI - MALABAI	01.01.11.08.01	0016	22,09	2007	Kec. Aesesa	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	KEKAKODO - KEDIMALI	01.01.11.08.01	0017	5,10	2007	Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	KODIWUWU - WUJI	01.01.11.08.01	0018	3,04	2007	Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	KOTAKEO - MBEKU	01.01.11.08.01	0019	13,17	2007	Kec. Nangaroro	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	KOTAKEO - PUSU - UA	01.01.11.08.01	0020	18,08	2007	Kec. Nangaroro dan Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	LEGO - REGA	01.01.11.08.01	0021	5,03	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	LENA - SOROWEA	01.01.11.08.01	0022	14,31	2007	Kec. Nangaroro	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	LIAILA - YOBGEMO - DHAWA	01.01.11.08.01	0023	2,72	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	LOWOKI - MABHASELE	01.01.11.08.01	0024	2,59	2007	Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	MALAWONA - DOZOWUWU	01.01.11.08.01	0025	2,80	2007	Aesesa Selatan	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	MARAPOKOT - NGGOLONIO	01.01.11.08.01	0026	12,62	2007	Kec. Aesesa	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	MAUKELI - BOLOROGA	01.01.11.08.01	0027	10,50	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	MAUPONGGO - MAUNORI	01.01.11.08.01	0028	8,26	2007	Kec. Mauponggo, Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	MAUPONGGO - PUUWADA	01.01.11.08.01	0029	17,90	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	MAUWARU - WOLOSAMBI	01.01.11.08.01	0030	4,13	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	NANGARORO - NUNUKONO	01.01.11.08.01	0031	12,14	2007	Kec. Nangaroro	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	NATASULE - PUSU	01.01.11.08.01	0032	5,96	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	NUAMURI - GIRIWAWO	01.01.11.08.01	0033	5,14	2007	Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	NUASELE - KELIWATUWEA	01.01.11.08.01	0034	2,34	2007	Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	OLAKILE - NAGERAWA	01.01.11.08.01	0035	9,54	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	OLAKILE - PUUWADHA	01.01.11.08.01	0036	6,50	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	PODENURA - RITI	01.01.11.08.01	0037	2,99	2007	Kec. Nangaroro	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	PUUEMBU - BOAMAU - LEWA	01.01.11.08.01	0038	6,58	2007	Kec. Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	RAJA - JAWAKISA	01.01.11.08.01	0039	13,22	2007	Kec. Boawae dan Aesesa Selatan	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	RAJA - MALAPOMA - BOANAI	01.01.11.08.01	0040	11,92	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	RATERUNU - WATUAPI	01.01.11.08.01	0041	10,23	2007	Kec. Wolowae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	REGA - SAWU	01.01.11.08.01	0042	18,03	2007	Kec. Boawae dan Mauponggo	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	REGA - WATUGASE	01.01.11.08.01	0043	3,63	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

44	ROE - MALAGARO - AERAMO	01.01.11.08.01	0044	5,54	2007	Kec. Aesesa	Milik		Tanah Jalan		1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	ROE - RATEDAO - NEBE	01.01.11.08.01	0045	11,53	2007	Kec. Aesesa	Milik		Tanah Jalan		1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	ROWA - SOA (BATAS NGADA)	01.01.11.08.01	0046	6,07	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47	SAWU - MULAKOLI	01.01.11.08.01	0047	10,64	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	TUNUATA - MAUNDAI	01.01.11.08.01	0048	2,79	2007	Kec.Keo Tengah	Milik		Tanah Jalan		1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	WOLOWEA - WESAWA	01.01.11.08.01	0049	8,72	2007	Kec. Boawae	Milik		Tanah Jalan		1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TANAH BANGUNAN DAN TANAH KOSONG											49	-	
1	Tanah DIKNAS Kecamatan Boawae	01.01.11.04.02	0001	1.333	2007	Kec. Boawae	Milik		Gedung Kantor	Hibah	1	9.530.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Tanah Kantor DIKNAS-Mauponggo	01.01.11.04.02	0001	250	2007	Kec. Mauponggo	Milik		Gedung Kantor	Hibah	1	1.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Tanah Kebun Sekolah SDI Tongatei	01.01.11.04.02	0001	30.000	2007	Kec. Nangaroro	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	10.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Tanah MIN Mbaya	01.01.11.04.02	0001	15.000	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Tanah SDI Alorawe	01.01.11.04.02	0001	50.000	2007	Kec. Boawae	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	17.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Tanah SDI Ameaba	01.01.11.04.02	0001	23.476	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	15.494.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Tanah SDI Boki	01.01.11.04.02	0001	224	2007	Kec. Mauponggo	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	548.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Tanah SDI Boloroga	01.01.11.04.02	0001	39.620	2007	Kec. Mauponggo	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	47.544.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Tanah SDI Butata	01.01.11.04.02	0001	45.000	2007	Kec. Aesel	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	15.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Tanah SDI Danga	01.01.11.04.02	0001	16.764	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	58.674.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	Tanah SDI Dorameli	01.01.11.04.02	0001	20.000	2007	Kec. Boawae	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	Tanah SDI Kodiwuwu	01.01.11.04.02	0001	3.500	2007	Kec. Keo Tengah	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	1.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	Tanah SDI Madambake	01.01.11.04.02	0001	9.314	2007	Kec. Nangaroro	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	3.259.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	Tanah SDI Malawona	01.01.11.04.02	0001	30.000	2007	Kec. Aesel	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	27.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	Tanah SDI Ndetu	01.01.11.04.02	0001	10.000	2007	Kec. Nangaroro	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	Tanah SDI Rata	01.01.11.04.02	0001	18.750	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	Tanah SDI Tasikapa	01.01.11.04.02	0001	25.000	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	22.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	Tanah SDI Tuanio	01.01.11.04.02	0001	20.000	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	Tanah SLTP 2 Aesesa/Towak	01.01.11.04.02	0001	25.815	2007	Kec. Aesesa	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	9.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	Tanah SLTP 1 Boawae / Raja	01.01.11.04.02	0001	10.000	2007	Kec. Boawae	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21	Tanah SLTP 1 Keo Tengah	01.01.11.04.02	0001	14.715	2007	Kec. Keo Tengah	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	17.658.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	Tanah SLTP 1 Nangaroro	01.01.11.04.02	0001	5.767	2007	Kec. Nangaroro	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	28.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	Tanah SLTP II Boawae / Gako	01.01.11.04.02	0001	11.000	2007	Kec. Boawae	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	Tanah SLTP II Mauponggo	01.01.11.04.02	0001	28.230	2007	Kec. Mauponggo	-		Bangunan Gedung	Hibah	1	33.876.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	Tanah Puskesmas Mauponggo	01.01.11.04.13	0001	3.811	2007	Kec Mauponggo	Milik		Bangunan Pusk.	Hibah	1	19.055.000,00	DINAS KESEHATAN
26	Tanah Pustu Jawakisa	01.01.11.04.13	0001	15.000	2007	Kec Aesesa	Milik		Bangunan Pustu	APBD	1	5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
27	Tanah Pustu Koekobho	01.01.11.01.10	0001	500	2007	Kec Nangaroro	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	175.000,00	DINAS KESEHATAN
28	Tanah Pustu Kotagana	01.01.11.04.12	0001	330	2007	Kec Mauponggo	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	808.500,00	DINAS KESEHATAN
29	Tanah Pustu Kotoderumali	01.01.11.04.12	0001	600	2007	Kec Keo Tengah	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	210.000,00	DINAS KESEHATAN
30	Tanah Pustu Lewangera	01.01.11.04.12	0001	600	2007	Kec Keo Tengah	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	210.000,00	DINAS KESEHATAN
31	Tanah Pustu Maukeli	01.01.11.04.12	0001	1.200	2007	Kec Mauponggo	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
32	Tanah Pustu Mundemi	01.01.11.04.12	0001	500	2007	Kec Keo Tengah	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	240.000,00	DINAS KESEHATAN
33	Tanah Pustu Nateute	01.01.11.04.12	0001	1.200	2007	Kec Nangaroro	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	420.000,00	DINAS KESEHATAN
34	Tanah Pustu Ndetunura	01.01.11.04.13	0001	375	2007	Kec Nangaroro	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	131.250,00	DINAS KESEHATAN
35	Tanah Pustu Nunukae	01.01.11.04.12	0001	900	2007	Kec Boawae	Milik		Bangunan Pustu	APBD	1	819.000,00	DINAS KESEHATAN
36	Tanah Pustu Pajomala	01.01.11.04.12	0001	400	2007	Kec Mauponggo	Milik		Bangunan Pustu	APBD	1	980.000,00	DINAS KESEHATAN
37	Tanah Pustu Solo	01.01.11.04.13	0001	900	2007	Kec Boawae	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	819.000,00	DINAS KESEHATAN
38	Tanah Pustu Sorowea	01.01.11.04.13	0001	950	2007	Kec Nangaroro	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	332.500,00	DINAS KESEHATAN
39	Tanah Pustu Tonggo	01.01.11.04.13	0001	1.500	2007	Kec Nangaroro	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	525.000,00	DINAS KESEHATAN
40	Tanah Pustu Utetoto	01.01.11.04.12	0001	1.200	2007	Kec Nangaroro	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	420.000,00	DINAS KESEHATAN
41	Tanah Pustu Wolosambi	01.01.11.04.12	0001	400	2007	Kec Mauponggo	Milik		Bangunan Pustu	Hibah	1	1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
42	Tanah Puskesmas Boawae	01.01.11.04.12	0001	1.390	2007	Kec Boawae	Milik		Bangunan Pusk.	Hibah	1	27.800.000,00	DINAS KESEHATAN
43	Tanah Lokasi pemukiman Transmigrasi	01.01.04.01	0001	213,77	2009	GE2U, DS. Kotakeo, Ke	Pakai		Lokasi Transmigrasi	Pembelian	1	20.500.000	DINAS SOSIAL
44	Tanah Pasar Aewoe	01.01.11.02.01	0001		2009	Aewoe	Pakai		Bangunan Pasar	APBD	1	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

45	Tanah Rumah Sakit Pratama	01.01.11.04.03	0001		2017	Tata Pem			Rencana RSU	APBD	1	1.817.997.000,00	BAGIAN ADMINSTRASI PEMERINTAHAN UMUM
46	Tanah Rumah Dinas Sekcam	01.01.11.04.25	0001		1996	Kec. Mauponggo	Pakai		Rumah Jabatan Sekcam	Hibah	1	3.910.000,00	KECAMATAN MAUPONGGO
47	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.04.01	0001			Nangaroro			Rumah Dinas Pegawai	Hibah	1	3.425.000,00	KECAMATAN NANGARORO
48	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.04.01	0001			Nangaroro			Rumah Dinas Pegawai	Hibah	1	2.950.000,00	KECAMATAN NANGARORO
49	Tanah Bangunan Kantor	01.01.11.04.01	0001	4.000	2007	KeL. Nangaroro			Gedung Kantor	Hibah	1	6.000.000,00	KELURAHAN NANGARORO
50	Tanah Kantor Lurah	01.01.11.04.01	0001	995	2007	Towak	Pakai		Gedung Kantor	Hibah	1	9.100.000,00	KELURAHAN TOWAK
51	Tanah Kantor Lurah	01.01.11.04.01	0001	4.950	2007	Dhawe-Kec. Aesesa			Gedung Kantor	Hibah	1	2.376.000,00	KELURAHAN DHAWE
52	Tanah Kantor Lurah	01.01.11.04.01	0001	10.000	2007	Kec. Aesesa			Gedung Kantor	Hibah	1	12.000.000,00	KELURAHAN LAPE
53	Tanah Kantor Lurah	01.01.11.04.01	0001	20.000	2007	Kec. Aesesa			Gedung Kantor	Hibah	1	70.000.000,00	KELURAHAN DANGA
54	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.01.10	0001		1962	Boawae	Pakai		Rumah Dinas	Hibah	1	4.075.500,00	KECAMATAN BOAWAE
55	Tanah Perkantoran (K 15)	01.01.11.04.01	0001	2.510	2002	Kel.Lape / Kec Aesesa	Pakai		Tanah Perkantoran	Hibah	1	4.267.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
56	Tanah Perkantoran (K 14)	01.01.11.04.01	0001	2.500	2002				Tanah Perkantoran	Hibah	1	4.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
57	Tanah Perkantoran di Lape (K13)	01.01.11.04.01	0001	2.930	2002				Tanah Perkantoran	Hibah	1	4.981.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
58	Tanah Kawasan Lambo	01.01.11.05.05	0001	119.800	2002					Hibah	1	79.068.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
59	Tanah Wewoloe (Rencana Terminal Barat)	01.01.11.05.05	0001		2007	Kec.Aesesa	Pakai		Tanah Kosong	Hibah	1	1.437.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
60	Tanah Wewoloe (Rencana Gedung Telkom)	01.01.11.05.05	0001		2007	Kec.Aesesa	Pakai		Tanah Kosong	Hibah	1	1.437.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
61	Tanah Wewoloe (Rencana Gedung PLN)	01.01.11.05.05	0001		2007	Kec.Aesesa	Pakai		Tanah Kosong	Hibah	1	1.437.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
62	Tanah Dadiwuwu	01.01.11.05.05	0001		2007	Kec.Aesesa	Pakai		Terminal	Hibah	1	2.205.625.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
63	Tanah Wololele	01.01.11.05.05	0001		2007	Kec.Aesesa	Pakai			Hibah	1	542.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
64	Tanah Perengating	01.01.11.05.05	0001		2007	Kec.Aesesa	Pakai			Hibah	1	9.113.625.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
65	Tanah Suku Ulupulu - Bidoa	01.01.11.05.05	0001	400.000	2007	Watakebo, (Ulupulu, Bidoa)			Kebun	Hibah	1	11.312.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
66	Tanah Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk	01.01.11.04.01	0001		2007	Kel. Danga / Kec Aesesa			Bangunan Kantor	Hibah	1	4.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
67	Tanah Kantor Dinas Peternakan	01.01.11.04.01	0001		2007				Bangunan Kantor	Hibah	1	5.771.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
68	Tanah Dinas Perkebunan	01.01.11.04.01	0001		2007				Bangunan Kantor	Hibah	1	750.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
											68	30.262.577.060,00	

lampiran 5					
1) Terdapat 5 (lima) bidang tanah yang dimanfaatkan masyarakat tanpa didasari perjanjian pemanfaatan. Kelima bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemkab Nagekeo senilai Rp4.841.545.017,00, dengan rincian sebagai berikut:					
No	Jenis Barang/Nama	Luas (M²)	Lokasi	Nilai (Rp)	OPD
1	Tanah Rumah Dinas Pegawai	685	Nangaroro	11.350.000,00	Kec. Nangaroro
2	Tanah Perumahan Dinas Paramedis di Danga	1.563	Danga	56.268.000,00	Dinas Kesehatan
3	Tanah Watukesu/ Danga (Kapet) 61 untuk Pengadilan	6.657	Danga	1.639.582.735,00	BKD
4	Tanah Watukesu/ Danga (Kapet) 63 untuk Kejaksaan	9.594	Danga	2.362.949.791,00	BKD
5	Tanah Watukesu/ Danga (Kapet) 66	3.132	Danga	771.394.491,00	BKD
Jumlah				4.841.545.017,00	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset BKD menyatakan bahwa saat ini Pemkab Nagekeo masih melakukan pendekatan personal kepada masyarakat yang menempati tersebut.

2) Terdapat 6 (enam) bidang tanah dimanfaatkan instansi lain tanpa didasari perjanjian pemanfaatan sebagai lokasi perkantoran. Keenam bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemkab Nagekeo dan dicatat dalam KIB A BKD senilai Rp1.602.178.677,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3. Tanah yang Dimanfaatkan Instansi Lain Tanpa Perjanjian Pemanfaatan

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M²)	Tahun Perolehan	Harga (Rp)
1	Tanah Kawasan Perkantoran / Kantor Departemen Agama	4.470	1998	22.350.000,00
2	Tanah Kawasan Perkantoran/Kantor UPT Pendapatan Prov.NTT (Samsat)	2.170	1999	10.850.000,00
3	Tanah Watukesu/Danga (Kapet) 72 Untuk BPN Nagekeo	3.995	2016	983.946.677,00
4	Tanah Kampus Garam	41.170	2017	144.095.000,00
5	Tanah Kampus Garam	27.946		97.811.000,00
6	Tanah Kampus Garam	28.920		343.126.000,00
Nilai				1.602.178.677,00

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset BKD menyatakan bahwa bangunan tersebut tujuannya memang akan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi perkantoran, namun sampai dengan saat ini belum terdapat dokumen hibah maupun pinjam pakai.

lampiran 7

Atas temuan pemeriksaan sebelumnya berupa 6 (enam) bidang tanah senilai Rp24.437.082.500,00 yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, telah ditindaklanjuti Pemkab Nagekeo dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Empat bidang tanah (Tanah Wolowae/Rencana Terminal barat, Tanah Wolowae/Rencana Gedung Telkom, Tanah Wolowae/Rencana Gedung PLN dan Tanah Dinas DKP) dengan total senilai Rp4.343.457.500,00 telah dapat ditelusuri keberadaannya. Tanah Dinas DKP telah dapat ditentukan batas-batasnya, sedangkan batas-batas tiga bidang tanah lainnya belum dapat ditentukan;
- 2) Tanah Kering/Maroladho (20 Ha) senilai Rp10.980.000.000,00, hasil penelusuran Bidang Aset BKD di lapangan menunjukkan di lokasi yang sama dengan tanah tersebut digunakan untuk:
 - a) Tanah RSD Aeramo seluas 98.465 m² senilai Rp520.800.000,00 (telah bersertifikat dan tercatat di KIB Dinkes);
 - b) Tanah Teknologi Tepat Guna (TTG) seluas 20.235 m² senilai Rp18.413.850,00 (telah bersertifikat dan tercatat di KIB BKD);
 - c) Tanah SMPN 3 Aesesa seluas ± 20.000 m² belum bernilai;
 - d) Tanah SMK Aesesa (telah dihibahkan ke Pemprov NTT); dan
 - e) Tanah Polres Nagekeo (telah bersertifikat a.n. Polres Nagekeo).

Terhadap tanah yang tercatat ganda di KIB yaitu Tanah RSD Aeramo dan Tanah TTG, Pemkab Nagekeo melakukan penghapusan pencatatan tanah ganda tersebut. Terhadap tanah yang telah dihibahkan, Pemkab Nagekeo melakukan reklasifikasi Aset Tetap Tanah tersebut ke Aset Lain-Lain untuk dilakukan proses penghapusan aset.

Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir, BAST Hibah tanah dari Pemkab Nagekeo kepada Polres Nagekeo belum disampaikan.

- 3) Tanah Perengating senilai Rp9.113.625.000,00, terhadap tanah tersebut Pemkab Nagekeo telah menelusuri ke lokasi serta melakukan konfirmasi kepada suku yang menyerahkan tanah tersebut ke Pemkab Ngada. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, para suku menyatakan tidak pernah melakukan hibah tanah kepada Pemkab Ngada. Atas hal tersebut, Pemkab Nagekeo mengajukan reklasifikasi Aset Tetap Tanah Perengating ke Aset Lain-Lain untuk melakukan tindak lanjut berikutnya.

Terhadap temuan pemeriksaan tahun sebelumnya terkait Aset Tanah Bawah Jalan dan Irigasi, Pemkab Nagekeo telah melakukan inventarisasi serta menerbitkan SK Nomor 225/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten dan SK Nomor 178/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Daerah Irigasi Kabupaten. Terhadap tanah di bawah ruas jalan dan daerah irigasi tersebut juga telah dilakukan penilaian.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tetap Tanah Tahun 2019 ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Informasi Aset Tetap Tanah pada KIB A belum lengkap, yaitu terdapat 30 (tiga puluh) bidang tanah tidak mencantumkan luas, 3 (tiga) bidang tanah tidak mencantumkan tahun perolehan, 1 (satu) bidang tanah tanpa lokasi, 2 (dua) bidang tanah tidak mencantumkan status penggunaan, serta 5 (lima) bidang tanah tidak mencantumkan status hak tanah.

1.1. Pencatatan Tanah yang tidak mencantumkan luasan

Rincian Pencatatan Aset Tetap dalam KIB A yang Tidak Lengkap

Lampiran 4

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengada	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	Ket	NAMA OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifika	Nomor						
1	Tanah	01.01.11.04.01	0001		2007	Bagian Umum	Hak Pakai		AG732242	Tanah	APBD	1	10.725.000,00	BERSERTIFIKAT	BAGIAN ADMINSTRASI UMUM
2	Tanah Lapangan Bola	01.01.13.01.05	0001		2018	Kel. Lape, Kec. Aesesa	Hak Pakai			Lapangan	Hibah	1	-	BERSERTIFIKAT	KELURAHAN LAPE
3	Tanah Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk	01.01.11.04.01	0031		2007	Kel. Danga / Kec.Aesesa	Hak Pakai			Bangunan	Hibah	1	4.930.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
4	Tanah Kantor Dinas Peternakan	01.01.11.04.01	0032		2007	Kel. Danga / Kec.Aesesa	Hak Pakai			Bangunan	Hibah	1	5.771.500,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
5	Tanah Dinas Perkebunan	01.01.11.04.01	0033		2007	Kel. Danga / Kec.Aesesa	Hak Pakai			Bangunan	Hibah	1	750.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
6	Tanah Wewoloe (Rencana Terminal Barat)	01.01.11.05.05	0064		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	1.437.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
7	Tanah Wewoloe (Rencana Gedung Telkom)	01.01.11.05.05	0065		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	1.437.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
8	Tanah Wewoloe (Rencana Gedung PLN)	01.01.11.05.05	0066		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	1.437.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
9	Tanah Terminal Daduwuwu	01.01.11.05.05	0067		2007	Kel. Lape, Kec.Aesesa	Hak Pakai			Terminal	Hibah	1	2.205.625.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
10	Tanah Wololele	01.01.11.05.05	0068		2007	Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	542.500.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
11	Tanah Perengating	01.01.11.05.05	0069		2007	Desa Nggolonio, Kec.Aesesa	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	9.113.625.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
12	Tanah Pelataran Parkir	01.01.13.02.03	0001		2019	Kampung Adat Kawa, Desa Labolewa, Kec. Aesesa	-	-	-	Pelataran	Hibah dari	1	0,00	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARWISATA
13	Tanah Rumah Sakit Pratama	01.01.11.04.03	0001		2017	Desa Raja Timur, Kec. Boawae	Hak Pakai			Rencana	APBD	1	1.817.997.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BAGIAN ADMINSTRASI PEMERINTAHAN UMUM
14	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.01.10	0001		1962	Boawae	Hak Pakai	-	-	Rumah	Hibah	1	4.075.500,00	BELUM BERSERTIFIKAT	KECAMATAN BOAWAE
15	Tanah Kantor Lurah	01.01.11.04.01	0001		2009	Nagenai, Kel. Natanage Timur, Kec. Boawae	Hak Pakai			Gedung	Swadaya	1	20.000.000,00	BERSERTIFIKAT	KELURAHAN NATANAGE TIMUR
16	Tanah Pelataran Parkir	01.01.13.02.03	0001		2019	Ua, Kel. Nageoga, Kec. Boawae	-	-	-	Pelataran	Hibah dari	1	0,00	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARWISATA
17	Tanah Pasar Aewoe	01.01.11.02.01	0001		2009	Desa Aewoe, Kec. Mauponggo	Hak Pakai	Belum	-	Bangunan	APBD	1	200.000.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
18	Tanah Rumah Dinas Sekcam	01.01.11.04.25	0002		1996	Kec. Mauponggo	Hak Pakai			Rumah	Hibah	1	3.910.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	KECAMATAN MAUPONGGO
19	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.04.01	0004			Nangaroro	Hak Pakai			Rumah	Hibah	1	3.425.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	KECAMATAN NANGARORO
20	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.04.01	0005			Nangaroro	Hak Pakai			Rumah	Hibah	1	2.950.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	KECAMATAN NANGARORO
21	Tanah Pelataran Parkir	01.01.13.02.03	0001		2019	Ds. Degalea, Kec. Nangaroro	-	-	-	Pelataran	Hibah dari	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARWISATA
22	Tanah BPP Keo Tengah	01.01.11.04.01	0034			Desa Kotawuji, Kec. Keo Tengah	Hak Pakai			Bangunan	Hibah	1	53.648.800,00	BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
23	Tanah Rest Area	01.01.11.01.10	0001		2019	Desa Renduola, Kec. Aesesa Selatan	-	-	-	Rest Area	Hibah dari	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARWISATA
24	Tanah Bawah Irigasi D.I Hedanara/Malaki	01.01.13.08.01	0015		2007	Desa Wolokisa, Kec. Mauponggo	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	Tanah Bawah Irigasi D.I Watujara	01.01.13.08.01	0018		2007	Desa Wololelu, Kec. Mauponggo	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	Tanah Bawah Irigasi D.I Watujajo	01.01.13.08.01	0019		2007	Desa Wololelu, Kec. Mauponggo	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	Tanah Bawah Irigasi D.I Boalewa	01.01.13.08.01	0047		2007	Desa Kel. Olakile, Kec. Boawae	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	Tanah Bawah Irigasi D.I Wasi	01.01.13.08.01	0059		2007	Desa Raja Timur, Kec. Boawae	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	Tanah Bawah Irigasi D.I Malanage	01.01.13.08.01	0066		2007	Desa Rowa, Kec. Boawae	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	Tanah Bawah Irigasi D.I Malangae	01.01.13.08.01	0090		2007	Desa Labolewa, Kec. Aesesa	Hak Pakai			Tanah	Hibah	1	-	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												30	18.302.432.800,00		

1.2. Pencatatan Tanah yang tidak mencantumkan tahun pengadaan

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	Ket	NAMA OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifika	Nomor						
1	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.04.01	0004			Nangaroro	Hak Pakai			Rumah	Hibah	1	3.425.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	KECAMATAN NANGARORO
2	Tanah Rumah Dinas Pegawai	01.01.11.04.01	0005			Nangaroro	Hak Pakai			Rumah	Hibah	1	2.950.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	KECAMATAN NANGARORO
3	Tanah BPP Keo Tengah	01.01.11.04.01	0034			Desa Kotawuiji, Kec. Keo Tengah	Hak Pakai			Bangunan	Hibah	1	53.648.800,00	BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
												3	60.023.800,00		

1.3. Pencatatan Tanah yang tidak mencantumkan lokasi

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	Ket	NAMA OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifika	Nomor						
1	Tanah Perumahan Dinas Kehutanan	01.01.11.04.01	0030	2.975	2002		Hak Pakai	01 Feb 1999	AG-	Bangu	Hibah	1	10.975.000,00	BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
												1	10.975.000,00		

1.4. Pencatatan Tanah yang tidak mencantumkan keterangan penggunaan

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	Ket	NAMA OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifika	Nomor						
1	Tanah Perkantoran (K 14)	01.01.11.04.01	0027		2.500	2002	Kel.Lape / Kec.Aesesa	Hak Pakai			Hibah	1	4.250.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
2	Tanah Perkantoran di Lape (K13)	01.01.11.04.01	0028		2.930	2002	Kel.Lape / Kec.Aesesa	Hak Pakai			Hibah	1	4.981.000,00	BELUM BERSERTIFIKAT	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
												2	9.231.000,00		

1.5. Pencatatan Tanah yang tidak mencantumkan keterangan status Hak Tanah

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Jml. Brg.	Harga	Ket	NAMA OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifika	Nomor						
1	Tanah Pelataran Parkir	01.01.13.02.03	0001		2019	Kampung Adat Kawa, Desa Labolewa, Kec. Aesesa	-	-	-	Pelataran	Hibah dari	1	0,00	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARIWISATA
2	Tanah Pelataran Parkir	01.01.13.02.03	0001		2019	Ua, Kel. Nageoga, Kec. Boawae	-	-	-	Pelataran	Hibah dari	1	0,00	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARIWISATA
3	Tanah Posyandu Bidiau Natanage	01.01.11.04.12	0001	100	2018	Lingkungan IV Bidiau, Kec. Boawae				Posyandu	Hibah	1	10.000.000,00		KELURAHAN NATANAGE
4	Tanah Pelataran Parkir	01.01.13.02.03	0001		2019	Ds. Degalea, Kec. Nangaroro	-	-	-	Pelataran	Hibah dari	1		BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARIWISATA
5	Tanah Rest Area	01.01.11.01.10	0001		2019	Desa Renduola, Kec. Aesesa Selatan	-	-	-	Rest Area	Hibah dari	1	0,00	BELUM BERSERTIFIKAT	DINAS PARIWISATA
												5	10.000.000,00		

1	Tanah Lapangan Bola Kaki Tomak	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Tomak, Kec. Asean	Hak Pakai	14/9/2012	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	85.622.280,00	BERBERTITIKAT	KELURAHAN TOMAK
2	Tanah Lapangan Bola Kaki Lapangan	01.01.19.01.06	0001		2010	Kel. Lupa, Kec. Asean	Hak Pakai			Lapangan	Hibah	1	68.120.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3	Tanah Komplek Perumahan / Kibredan / Lapangan Kibredan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Perumahan/Kibredan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4	Tanah Komplek Perumahan / Kibredan / Lapangan Kibredan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Perumahan/Kibredan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
7	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
8	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
9	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
10	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
11	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
12	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
13	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
14	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
15	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
16	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
17	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
18	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
19	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
20	Tanah Lapangan / Lapangan	01.01.19.01.06	0001	42.115	2009	Kel. Damar, Kec. Asean	Hak Pakai	28/07/2008	KDI.42.4.0	Lapangan	Hibah	1	1.000.000,00	BERBERTITIKAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DOKUMENTASI PENELITIAN





UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS EKONOMI

TERAKREDITASI BAN-PT

No. 1710/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016, 26 Agustus 2016 (Prodi S1 Manajemen)

No. 1562/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016, 11 Agustus 2016 (Prodi Ekon. Pembangunan)

No. 028/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016, 02 September 2016 (Prodi S1- Akuntansi)

Kampus I Jl. Sam Ratulangi, No.XX, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah

Kabupaten Ende- Flores NTT kode Pos 86318, Telp.(0381) 21536

Nomor : 448/115/31/F6/N/X/2020
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : Izin Untuk Mengadakan Penelitian

20 Oktober 2020

Kepada Yang Terhormat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo
Di - Mbay

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Flores Ende, para mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi dari bidangnya masing-masing.

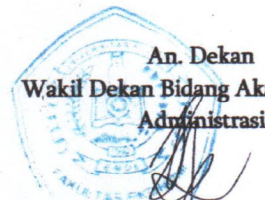
Untuk itu kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : FLORIDA NGOLE TEY
Nim : 2016441209
Prog.Studi : Akuntansi

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka penulisan tugas akhir dengan Judul penelitian "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo".

Kerahasiaan data akan dipegang teguh dan hanya khusus digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Administrasi

Dr. Rafael Octavianus Byre, SE., M.Sc.
NIDN. 0826097401

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Nagekeo;
2. Dekan Fakultas Ekonomi (sebagai laporan);
3. Ketua Program Studi Akuntansi FE Univ. Flores;
4. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno - Hatta, Kompleks Civic Center, Mbay 86472

Pos - el: nagekeodpmpmsp@gmail.com

Website: <https://dpmpmsp.nagekeo.go.id>

IZIN PENELITIAN

Nomor: 503/DPMPSP-NGK/IP/171/10/2020

- DASAR** :
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo;
 - e. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo;
 - f. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

MEMPERHATIKAN: Permohonan Izin untuk mengadakan Penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores :

Nomor : 448/115/31/F6/N/X/2020

Nama Peneliti : Florida Ngole Tey

Tanggal : 20 Oktober 2020

Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo".

Tempat Penelitian : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

Waktu Penelitian : 2 (Dua) Minggu.

MENIMBANG : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka terhadap Pemohon dapat diberikan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

KEPADA :
Nama : Florida Ngole Tey
Nim : 2016441209
Jurusan : Akuntansi
Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo".
Tempat Penelitian : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.
Waktu Penelitian : 2 (Dua) Minggu sejak tanggal dikeluarkan.

Peneliti berkewajiban menghormati, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Nagekeo cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo.

Dikeluarkan di : Mbay
pada tanggal : 23 Oktober 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nagekeo,
Sekretaris,

ub. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu,


JOENTA BUPU TOYO, SS
Pembina
NIP. 19730102 200604 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo
2. Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Kabupaten Nagekeo di Mbay;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores di Ende.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
BADAN KEUANGAN DAERAH

JLN. SOEKARNO HATTA. .. Email: bkdnkgk@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 423.6/BKD-NGK/812/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pone Florentinus, Se.M.Si
NIP : 119610321 199303 1 004
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Florida Ngole Tey
NIM : 2016441209
Jurusan : Akuntansi

Telah menyelesaikan Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo selama dua (2) minggu , terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah berdasarkan PSAP 07 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Di keluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 11 November 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Nagekeo,
Pone Florentinus, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610321 199303 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno – Hatta, Kompleks Civic Centre, Mbay 86472

Pos-el: nagekeodpmpstsp@gmail.com

Website: <https://dpmpstsp.nagekeo.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 503/DPMPSTSP-NGK/SKSP/142/11/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOLENTA BUPU TOYO, S.S**
NIP : 197301022006042004
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

bahwa berdasarkan Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Nomor: 503/DPMPSTSP-NGK/IP/171/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor: 423.6/BKD-NGK/812/11/2020 tanggal 11 November 2020, serta memperhatikan laporan hasil penelitian Saudari Florida Ngole Tey dengan ini menerangkan:

Nama : **Florida Ngole Tey**
NIM : 2016441209
Program Studi : Akuntansi

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo”**. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mbay, 16 November 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nagekeo

u.b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu,



YOLENTA BUPU TOYO, SS

Pembina

NIP 197301022006042004

Tembusan disampaikan kepada Yth:








1. Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Kabupaten Nagekeo di Mbay;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores di Ende.



UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS EKONOMI
PRODI AKUNTANSI
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama mahasiswa : FLORIDA NGOLE TEY
2. NIM : 2016441209
3. Bidang Kajian Skripsi :
4. Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo
5. Tanggal Pengajuan Skripsi :
6. Nama Pembimbing : 1. Nuraini Ismail, SE., M.Aks.
2. Sesilianus Kapa, SE., MM
7. Keterangan Konsultasi :


No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
1.	3 Juli 2020	Konsultasi Bab I		
2.	10 Juli 2020	Konsultasi Revisi Bab I		
3.	13 Juli 2020	-- Konsultasi Bab I		
		-- Lanjut Bab II, III		
4.	5 Agustus 2020	-- Konsultasi Bab I, II, III		
5.	10/8/2020	-- Revisi Bab I, II, III		
		-- Konsultasi		
6.	12/8/2020	Acc u/ seuaran		
7.	12/08/2020	Konsultasi Bab I, II, III		
8.	13/08/2020	Konsultasi Revisi Bab I, II, III		
9.	14/08/2020	Konsultasi Revisi Bab I, II, III		
10.	18/08/2020	Acc hap diseuaran.		
11.	7/12/20	Konsultasi Bab IV & V, Revisi		

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
12.	21/12/20	- konsultasi revisi - Acc ke pembimbing II		
13.	05/01/21	- konsultasi bab IV dan bab V		 
14.	07/01/21	- Acc revisi bab IV dan V		
15.	11/1/2021	- konsultasi bab IV & V - revisi - Acc U/ di uji	  	

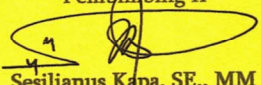
8. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi :

9. Telah dievaluasi dan Diuji dengan Nilai :

Pembimbing I


Nuraini Ismail, SE., M.Aks.
NIPY. 1980 2009 393

Pembimbing II


Sesilianus Kapa, SE., MM
NIPY. 1980 2000 167


Mengetahui
Ketua Program Studi

Apriana Marselina, SE., M.Sc.
NIPY. 1980 2007 338